

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan untuk melakukan perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep dari pembangunan yaitu proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik sehingga terdapat tingkat kesejahteraan pada suatu negara (Kartono & Nurcholis, 2016).

2.1.1 Jenis – Jenis Pembangunan

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci untuk segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan warga negara, kemajuan sering disebut sebagai kemajuan material. Dengan demikian, pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat di bidang ekonomi, bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan (Andriyani, 2013).

Pembangunan sebenarnya meliputi 2 (dua) unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil keputusan, yang menjadi manusia pembangun. Menurut (Kartono & Nurcholis, 2016) terdapat 3 (tiga) jenis pembangunan yaitu:

1. *Economic Growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan)

Teori ini menekankan pada pertumbuhan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) selama periode waktu yang telah ditentukan. Pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi fokus pada produksi, antara lain melalui:

- a. Akumulasi modal meliputi investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- c. Kemajuan teknologi, yaitu cara baru untuk menggantikan pekerjaan tradisional.

2. *Basic Needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan)

Teori ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan cara memenuhi secara langsung semua kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

3. *People Centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia)

Inti dari proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia. Contoh dari model ini adalah *empowering*/pemberdayaan. Dalam proses ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong

perkembangan manusia dan mewujudkan potensi manusia dalam skala yang lebih besar.

2.2 Definisi Preservasi Jalan

Preservasi jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, pemeliharaan, dan perbaikan yang diperlukan untuk memelihara kondisi jalan agar tetap dapat berfungsi secara optimal bagi lalu lintas sehingga mencapai usia rencana yang ditentukan. Preservasi jalan sebagai kegiatan pemeliharaan, pemulihan, rekonstruksi, dan peluasan jalan dengan standar yang berkelanjutan untuk menjaga jalan dalam kondisi prima (Indonesia, 2017).

2.2.1 Tujuan Pemeliharaan Jalan

Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan yang sesuai dengan tingkat pelayanan dan kapasitasnya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan usia rencana yang ditentukan tercapai. Pemeliharaan jalan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas serta sarana-sarana pendukungnya (Rahmat et al., 2019).

2.3 Definisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak kemajuan ekonomi. Berdasarkan anggaran publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai mesin pembangunan daerah dan nasional (Andriyani, 2013). Dengan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan yang dibutuhkannya seperti mobilitas, mempercepat arus distribusi barang dan jasa

dengan mempermudah pengiriman sarana produksi dan mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar dengan memberikan aksesibilitas, serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna infrastruktur tersebut. Berikut adalah beberapa contoh infrastruktur: jalan, jalan tol, jembatan, bendungan, stadion, konstruksi bangunan dan lain sebagainya (Hermansyah, 2021).

2.3.1 Infrastruktur Jalan

Mengingat pentingnya kinerja dan efisiensi, maka biaya perjalanan atau biaya transportasi yang rendah menjadi tolak ukur untuk sistem transportasi yang baik. Dengan transportasi yang handal, waktu pengiriman barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain dapat direncanakan dan dijadwalkan dengan baik, waktu dapat diatur sesingkat mungkin, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan (Kartono & Nurcholis, 2016). Selain itu, jalan juga dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (natural) dan jalan buatan (artifisial). Jalan alam merupakan pemberian alam dan tersedia secara bebas untuk semua orang. Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun atas usaha manusia secara sadar dengan sejumlah investasi dan tertentu untuk membuat konstruksi dan pemeliharannya. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 38 Perpres (2022) Klasifikasi jalan dibedakan sebagai berikut:

a. Menurut Permukaan Jalan

1. Jalan Aspal adalah jalan yang permukaannya terbuat dari aspal atau campuran keras lainnya.
2. Jalan Kerikil adalah jalan yang permukaannya terdiri dari kerikil kecil dan jenis jalan ini biasanya terdapat pada jalan yang sudah diaspal.

3. Jalan Tanah adalah jalan yang permukaannya terdiri dari tanah.

b. Menurut Fungsi Jalan

1. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan keluar masuk terbatas.
2. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan keluar masuk terbatas.
3. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan keluar masuk tidak terbatas.
4. Jalan Lingkungan adalah jalan yang melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

c. Menurut Sistem Jaringan

1. Jalan Primer adalah jalan yang berperan untuk menyalurkan distribusi barang dan jasa yang menghubungkan semua wilayah nasional dan antar perkotaan.
2. Jalan Sekunder adalah jalan yang berperan hanya distribusi barang dan jasa hanya dalam kawasan perkotaan.

d. Menurut Status Jalan

1. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, termasuk jalan tol.
2. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan kota provinsi dengan kota kabupaten/kota

3. Jalan Kabupaten/Kota adalah jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dengan kecamatan

e. Menurut Kondisi Jalan

1. Jalan Baik adalah jalan yang dapat dilalui dengan kecepatan lebih dari 60 km/jam dan selama 2 tahun ke depan tanpa perlu dilakukan pemeliharaan permukaan.
2. Jalan Sedang adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40-60 km/jam dan selama 1 tahun mendatang tanpa rehabilitasi pada pengerasan jalan.
3. Jalan Rusak Ringan adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20-40 km/jam dan perlu perbaikan pondasi jalan.
4. Jalan Rusak Berat adalah jalan yang hanya dapat dilalui dengan kendaraan dengan kecepatan kurang dari 20 km/jam dan biasanya untuk bentuk permukaannya berbauan kasar atau tanah lumpur.

2.4 Definisi Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Infrastruktur merupakan bagian fundamental dari perekonomian dan pada tahap pembangunan ketersediaan infrastruktur menjadi tuntutan tersendiri. Pembangunan Infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendukung negara berkembang (Todaro & Smith, 2015). Pembangunan infrastruktur berperan memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha dan memberikan *output* hasil produksi sebagai *input* untuk konsumsi (Hermansyah, 2021).

2.5 Kualitas Layanan

Kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti: kinerja, keandalan, kemudahan penggunaan, dan estetika. Adapun dalam definisi strategis kualitas adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Kualitas adalah suatu tujuan yang susah dimengerti sebab harapan masyarakat selalu berubah. Setiap kali ditemukan standar yang baik, masyarakat akan menuntut lagi agar diperoleh standar yang lebih baru dan lebih baik, sehingga selalu dituntut peningkatan standar (Riyanto, 2018).

2.6 Definsi Masyarakat

Masyarakat dalam istilah Bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Masyarakat adalah sekelompok manusia yang rukun, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi satu sama lain. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial (Istianah, 2012).

2.6.1 Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat didefinisikan sebagai tanggapan masyarakat terhadap kesesuaian antara kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah penggunaan. Kepuasan masyarakat ditentukan oleh berbagai jenis layanan yang diterima masyarakat saat menggunakan beberapa tahapan layanan tersebut (Siregar, 2015). Ketidakpuasan yang diperoleh pada tahap awal pelayanan menimbulkan persepsi berupa kualitas pelayanan yang buruk untuk tahapan selanjutnya, sehingga masyarakat tidak puas terhadap pelayanan secara keseluruhan. Salah satu faktor penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap kualitas pelayanan masyarakat mengenai mutu jasa yang berfokus pada lima dimensi jasa, yaitu ketanggapan (*responsiveness*), keandalan (*reliability*), perhatian (*emphaty*), jaminan (*assurance*), dan bukti langsung (*tangible*) (Riyanto, 2018).

2.6.2 Pengukuran Kepuasan Masyarakat

Efikasi diri adalah keyakinan individu atas kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan perilaku yang dibutuhkan dalam mencapai hasil tertentu. Efikasi diri merupakan salah satu indikator pengukuran nilai personal, yaitu sebagai bentuk evaluasi terkait dengan kemampuan dalam melakukan suatu aktivitas atas tujuan yang terencana (Armasnyah, 2023)

Menurut (Indonesia, Republik, 2019) ada 5 (lima) manfaat dari pengukuran mutu dan kepuasan masyarakat, yaitu :

1. Pengukuran memotivasi orang untuk bekerja dan mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

2. Pengukuran memberikan wawasan tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat, serta melakukannya.
3. Pengukuran memberikan umpan balik langsung kepada pelaksana, terutama ketika masyarakat sendiri yang mengukur kinerja pelaksana atau perusahaan yang menyediakan layanan.
4. Pengukuran dapat dijadikan dasar untuk menentukan standar kinerja dan standar prestasi yang harus dicapai, yang akan mengarah pada peningkatan kualitas dan peningkatan kepuasan masyarakat.
5. Pengukuran membuat orang memiliki rasa berhasil dan berprestasi, yang kemudian diterjemahkan menjadi pelayanan prima kepada masyarakat.